

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON : 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE : 021-3843768





**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Djir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhamad Djir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (2021: 63,45)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	3

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	62.950.000.000,-
Program Dukungan Manajemen	167.517.321.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2022	230.467.321.000,-

Jakarta, Januari 2022
Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhamad Effendy



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhamdijir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pihak Pertama:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhamdijir Effendy

Y.B. Satya Sananugraha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya tata kelola kelembagaan Kemenko PMK	Niai Reformasi Birokrasi	82,01
	Indeks Maturitas SPIP	Level 3
Meningkatnya kualitas layanan dukungan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas layanan Sekretariat	5,70 (skala 6)
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kemenko PMK	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Peringkat Komposit 4 (Skor 61 sd 80)
Meningkatnya tata kelola komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90
Meningkatnya tata kelola Sistem Informasi Manajemen Kemenko PMK	Indeks SPBE	3,4
Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Perencanaan	5
	Nilai SAKIP	81,51
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Risiko	Indeks Manajemen Risiko	3
Meningkatnya Kompetensi SDM	Indeks Profesionalisme ASN	78
Meningkatnya sarana dan prasarana	Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana Unit Setkemenko	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	Opini BPK	WTP
	Indeks IKPA	97,7

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	154.031.409.000,-

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhamad Effendy



Y.B. Satya Sananugraha



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhamdijir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,



Muhamdijir Effendy



Andie Megantara, Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan	8,5-9,0%
	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	87,00%
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase isu-isu strategis bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	100% (3 Isu Strategis)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan	4
	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Indeks Pengendalian Program Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Nilai Reformasi Birokrasi	82,01

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	4.400.000.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.000.000.000,-
Jumlah Anggaran	5.400.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,



Andie Megantara, Ph.D.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ade Rustama, MP
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Pihak Pertama:
Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Andie Megantara, Ph.D.

Drs. Ade Rustama, MP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	78
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	97,7

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	400.000.000,-
Layanan Layanan Manajemen Kinerja Internal	600.000.000,-
Jumlah Anggaran	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,



Andie Megantara, Ph.D.

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial,



Drs. Ade Rustama, MP



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Andie Megantara, Ph.D.

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia,

Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia 1. RAK Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas 2. RAK Penguatan Layanan Terpadu dan Pendampingan bagi Lanjut Usia	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,



Andie Megantara, Ph.D.

Asisten Deputi
Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia,



Drs. Ponco Respati Nugroho, M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Andie Megantara, Ph.D.

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Jaminan Sosial,

Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Jaminan Sosial
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Jaminan Sosial	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Jaminan Sosial 1. RAK Bidang Peningkatan Cakupan, Kepatuhan dan Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional 2. RAK Bidang Perluasan Kepesertaan, Kepatuhan dan Pengembangan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Sosial	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Sosial	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Sosial	Indeks Pengendalian Program Bidang Jaminan Sosial	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.050.000.000,-

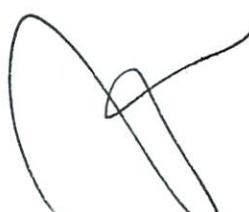
Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kesejahteraan Sosial,



Andie Megantara, Ph.D.

Asisten Deputi
 Jaminan Sosial,



Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Rukawiani, S.E, M.AP
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Andie Megantara, Ph.D.

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Penanganan Kemiskinan,

Eni Rukawiani, S.E, M.AP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Penanganan Kemiskinan 1. RAK Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar dan Pengentasan Kemiskinan 2. RAK Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Kemiskinan	Indeks Pengendalian Program Bidang Penanganan Kemiskinan	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.100.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Andie Megantara, Ph.D.

Asisten Deputi
 Penanganan Kemiskinan,

Eni Rukawiani, S.E, M.AP



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Pihak Pertama:
Plt. Asisten Deputi
Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran,



Andie Megantara, Ph.D.

Andie Megantara, Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran 1. RAK Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dan Integrasi Bantuan Sosial 2. RAK Transformasi Subsidi Energi Tepat Sasaran	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	Indeks Pengendalian Program Bidang Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.250.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kesejahteraan Sosial,



Andie Megantara, Ph.D.

Plt. Asisten Deputi
Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran,



Andie Megantara, Ph.D.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhamad Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Muhamad Effendy

Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Daerah yang meningkat Pencapaian Indeks Komposit Daerah Tertinggalnya	8
	Rata-rata Nilai Indeks Pengelolaan 52 Kawasan Transmigrasi	53,12
	Daerah yang memiliki Rencana Penanggulangan Bencana	2
	Indeks Penanganan Konflik Sosial, Radikalisme dan Terorisme	77,13
	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum darurat bencana dan persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	90
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Persentase isu-isu strategis bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	100% (3 Isu Strategis)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana yang dihasilkan	4
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Nilai Reformasi Birokrasi	82,01

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	5.850.000.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.500.000.000,-
Jumlah Anggaran	7.350.000.000,-

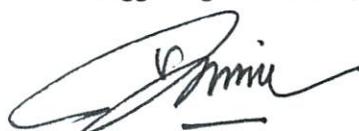
Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,



Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ivan Syamsurizal, S.T., M.T.
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,



Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Pihak Pertama:
Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
dan Penanggulangan Bencana,



Dr. Ivan Syamsurizal, S.T., M.T.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	78
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	97,7

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	525.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	975.000.000,-
Jumlah Anggaran	1.500.000.000,-

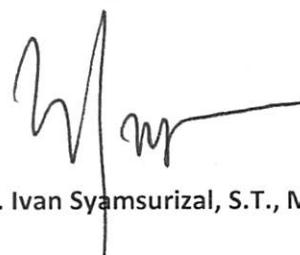
Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,



Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah
dan Penanggulangan Bencana,



Dr. Ivan Syamsurizal, S.T., M.T.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Pemerataan Pembangunan Wilayah,

Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

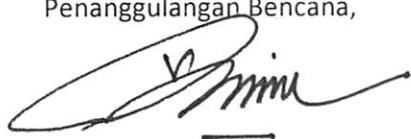
Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah <ul style="list-style-type: none"> 1. RAK Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional 2. RAK Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah 	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,



Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Asisten Deputi
Pemerataan Pembangunan Wilayah,



Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial,

Ir. Mustikorini Indrijatiningrum, M.E

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial 1. RAK Penyelenggaraan Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Mendukung Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Kawasan 2. RAK Pengembangan Konektifitas dan Aksesibilitas Spasial dalam Mendukung Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Kawasan 3. RAK Penegakan Aparatur Pemerintah Desa 4. RAK Pemberdayaan Masyarakat	4
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	2.500.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Asisten Deputi
Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial,

Ir. Mustikorini Indrijatiningsrum, M.E



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Andre Notohamijoyo, S.Sos., MSM
Jabatan : Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial,

Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Dr. Andre Notohamijoyo, S.Sos., MSM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial 1. RAK Pengurangan Risiko Bencana 2. RAK Penanganan Konflik Sosial, Radikalisme dan Terorisme	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	Indeks Pengendalian Program Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1.100.000.000,-

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,



Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Jakarta, Januari 2022
Asisten Deputi
Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial,



Dr. Andre Notohamijoyo, S.Sos., MSM



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelwan Harahap, S.P.

Jabatan : Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,

Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana,

Nelwan Harahap, S.P.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana 1. RAK Penguatan Manajemen dan Sinergitas Multipihak Penanggulangan Darurat Bencana 2. RAK Penguatan Manajemen dan Sinergitas Multipihak Pemulihan pasca bencana	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	Indeks Pengendalian Program Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1.250.000.000,-

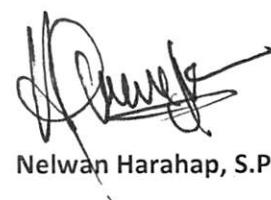
Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah dan
Penanggulangan Bencana,



Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.

Asisten Deputi
Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana,



Nelwan Harahap, S.P.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhamdijir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhamdijir Effendy

Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,



Drg. Agus Suprapto, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91
	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	71
	Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar	94,1
	Persentase Desa/kelurahan stop buang Air besar sembarangan	60
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Persentase isu-isu strategis bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	100% (3 Isu Strategis)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang dihasilkan	4
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Indeks Pengendalian Program Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Nilai Reformasi Birokrasi	82,01

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	4.500.000.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.000.000.000,-
Jumlah Anggaran	5.500.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,



Drg. Agus Suprapto, M.Kes



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Pasli, S.STP., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,


Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Pihak Pertama:
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,


Imam Pasli, S.STP., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	78
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	97,7

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	490.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	510.000.000,-
Jumlah Anggaran	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,



Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,



Imam Pasli, S.STP., M.Si.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K.
Jabatan : Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan,

Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

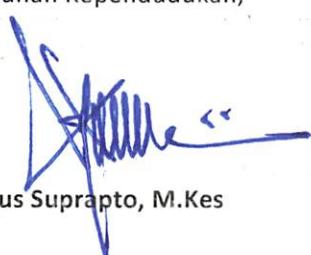
Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan 1. RAK Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak dalam Mendukung Penurunan Stunting dan AKI-AKB 2. RAK Peningkatan Promosi Kesehatan di Semua Tatanan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	Indeks Pengendalian Program Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	1.250.000.000,-

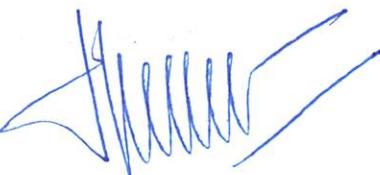
Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,



Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Asisten Deputi
Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan,



Jelsi Natalia Marampa, SKM, M.K.K.K.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Andi Rahmadi, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Kependudukan dan
Keluarga Berencana,

Ir. Andi Rahmadi, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana 1. RAK Penguatan Pembangunan Kependudukan 2. RAK Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Indeks Pengendalian Program Bidang Kualitas Kependudukan dan Keluarga Bencana	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	1.100.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,



Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Asisten Deputi
Peningkatan Kualitas Kependudukan dan
Keluarga Berencana,



Ir. Andi Rahmadi, M.Sc



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Nia Reviani, MAPS
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan,

dr. Nia Reviani, MAPS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. RAK Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 2. RAK Penguatan Tata Kelola Pembiayaan Kesehatan, Farmasi dan Alat Kesehatan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks Pengendalian Program Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,



Drg. Agus Suprapto, M.Kes

Asisten Deputi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan,



dr. Nia Reviani, MAPS



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid.
Jabatan : Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drg. Agus Suprapto, M.Kes
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan,	Pihak Pertama: Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Drg. Agus Suprapto, M.Kes

dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 1. RAK Penanggulangan KLB/Wabah dan Kedaruratan Kesehatan 2. RAK Pengendalian Penyakit	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Indeks Pengendalian Program Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Kesehatan	1.150.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan,

Asisten Deputi
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit,



Drg. Agus Suprapto, M.Kes



dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhamdijir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda,

Muhamdijir Effendy

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN, DAN PEMUDA

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,87
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,11 - 91,22
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,67
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Persentase isu-isu strategis bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	100% (3 Isu Strategis)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda yang dihasilkan	4
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Indeks Pengendalian Program Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Nilai Reformasi Birokrasi	82,01

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	4.300.000.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.000.000.000,-
Jumlah Anggaran	5.300.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda,



Muhamad Effendy



Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Yohan., M.Si
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Pihak Pertama:
Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda,

Dr. Drs. Yohan., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	78
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	97,7

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	413.520.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	586.480.000,-
Jumlah Anggaran	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda,

Dr. Drs. Yohan., M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Imron Rosadi, S.Sos., M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua: Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda,	Pihak Pertama: Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Dr. Imron Rosadi, S.Sos., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 1. RAK Bidang Pemenuhan Hak Anak 2. RAK Perlindungan Khusus Anak	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.150.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak,

Dr. Imron Rosadi, S.Sos., M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roos Diana Iskandar, MA
Jabatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Pemenuhan Hak, Perlindungan,
dan Pemberdayaan Perempuan,

Roos Diana Iskandar, MA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan 1. RAK Pemenuhan Hak dan Pemberdayaan Perempuan 2. RAK Perlindungan Perempuan	1 2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Asisten Deputi
Pemenuhan Hak, Perlindungan,
dan Pemberdayaan Perempuan,

Roos Diana Iskandar, MA



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom
Jabatan : Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Pemberdayaan Pemuda,

Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemberdayaan Pemuda 1. RAK Peningkatan Kapasitas Pemuda dalam Rangka Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja 2. RAK Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda: Kekerasan dan Perundungan	1 2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemberdayaan Pemuda	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Asisten Deputi
Pemberdayaan Pemuda,

Linda Restaningrum, SE, M.I.Kom



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Indah Suwarni, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Dra. Indah Suwarni, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1. RAK Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 2. RAK Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pengendalian Program Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang Sosial	1.150.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda,

Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi

Asisten Deputi
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

Dra. Indah Suwarni, M.Si



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhamd Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

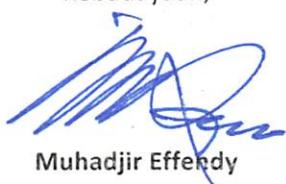
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

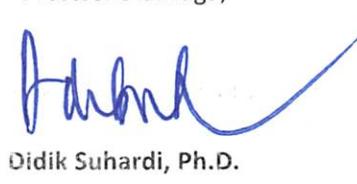
Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,



Muhamd Effendy

Pihak Pertama:
Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL, PEMAJUAN KEBUDAYAAN,
DAN PRESTASI OLAHRAGA

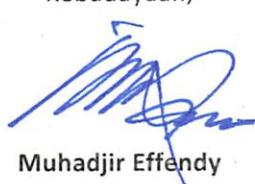
Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Indeks Capaian Revolusi Mental Indeks Pembangunan Kebudayaan	71,96 59,71
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Percentase isu-isu strategis bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga yang dihasilkan	100% (3 Isu Strategis) 4
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Indeks Pengendalian Program Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Nilai Reformasi Birokrasi	82,01

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	33.100.000.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.000.000.000,-
Jumlah Anggaran	34.100.000.000,-

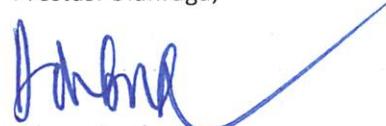
Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,



Muhamad Effendy

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Molly Prabawaty, M.AP
Jabatan : Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Didik Suhardi, Ph.D.

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Literasi, Inovasi, dan Kreativitas,

Dra. Molly Prabawaty, M.AP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 1. RAK Peningkatan Budaya Literasi 2. RAK Pengembangan Budaya IPTEK, Inovasi, Kreatifitas, dan Daya Cipta	1 2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	Indeks Pengendalian Program Bidang Literasi, Inovasi dan Kreativitas	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.100.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Asisten Deputi
Literasi, Inovasi, dan Kreativitas,



Dra. Molly Prabawaty, M.AP



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

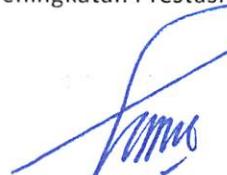
Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Peningkatan Prestasi Olahraga,



Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

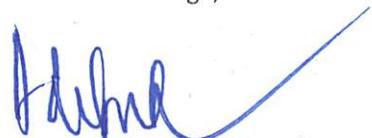
Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 1. RAK Pembudayaan Olahraga 2. RAK Peningkatan Prestasi Olahraga	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks Pengendalian Program Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Asisten Deputi
Peningkatan Prestasi Olahraga,



Ir. Gatot Hendrarto, M.Sc



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Maman Wijaya, M.Pd
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Pihak Pertama:
Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan
Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga,

Didik Suhardi, Ph.D.

Dr. Maman Wijaya, M.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	78
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	97,7

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	400.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	600.000.000,-
Jumlah Anggaran	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
 Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
 Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Sekretaris Deputi Bidang
 Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan
 Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga,



Dr. Maman Wijaya, M.Pd



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Katiman, SE, MPP,MPA
Jabatan : Asisten Deputi Revolusi Mental

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,



Didik Suhardi, Ph.D.

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Revolusi Mental,



Katiman, SE, MPP,MPA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Revolusi Mental
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Revolusi Mental	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Revolusi Mental <ol style="list-style-type: none"> 1. RAK Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan 2. RAK Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan 3. RAK Revolusi Mental dalam Sistem Sosial 	3
	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	1
	Jumlah Dokumen Penguatan Pusat Perubahan di tingkat Daerah	1
	Jumlah Dokumen Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	1
	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi Mental	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Revolusi Mental	Indeks Pengendalian Program Bidang Revolusi Mental	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.625.138.000,-
Komunikasi Publik	5.801.605.000,-
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22.573.257.000,-
Jumlah Anggaran	30.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Deputi Bidang Koordinasi
Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga,

Didik Suhardi, Ph.D.

Asisten Deputi
Revolusi Mental,

Katiman, SE, MPP, MPA



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM.
Jabatan : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Didik Suhardi, Ph.D.
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

<p>Pihak Kedua: Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga,</p>	<p>Pihak Pertama: Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan,</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Didik Suhardi, Ph.D.

Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 1. RAK Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. RAK Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pengendalian Program Bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000

Jakarta, 2 Januari 2022
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga,
Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan,



Didik Suhardi, Ph.D.



Jazziray Hartoyo, S.Sos, M.Ed, MM.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhamdijir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,



Muhamdijir Effendy

Pihak Pertama:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,



Y.B. Satya Sananugraha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN
MODERASI BERAGAMA

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Tahun Anggaran : 2022
Moderasi Beragama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya implementasi kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	9,13
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,70
	Persentase isu-isu strategis bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	100% (3 Isu Strategis)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama yang dihasilkan	4
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Indeks Pengendalian Program Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	3
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Nilai Reformasi Birokrasi	82,01

Kegiatan	Anggaran (Rp)
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	4.300.000.000,-
Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.000.000.000,-
Jumlah Anggaran	5.300.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama.



Muhadiir Effendy

Muhadjir Effendy

Y.B. Satya Sanapugraha



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

Pihak Pertama:
Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
dan Moderasi Beragama,

Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng

Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretaris Deputi Bidang koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	Jumlah Dokumen Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	4
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	2
	Indeks Profesionalisme ASN Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	73
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	96

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal	327.907.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	672.093.000,-
Jumlah Anggaran	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
dan Moderasi Beragama,

Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng

Raden Wijaya Kusumawardhana, ST, MMIB



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Pendidikan Keagamaan,

Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

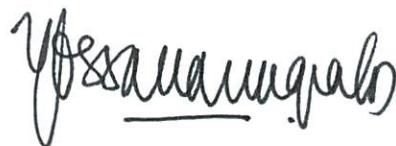
Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Keagamaan
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pendidikan Keagamaan	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pendidikan Keagamaan 1. RAK Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan 2. RAK Peningkatan Akses Perguruan Tinggi Keagamaan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Keagamaan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Keagamaan	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Keagamaan	Indeks Pengendalian Program Bidang Pendidikan Keagamaan	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
 Moderasi Beragama,



Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng

Asisten Deputi
 Pendidikan Keagamaan,



Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB

Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng

Pihak Pertama:

Asisten Deputi
Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan
Menengah,

Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah 1. RAK Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Melalui Penjaminan Mutu dan Akses Terhadap Standar Nasional Pendidikan 2. RAK Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter dan Kewargaan di Satuan Pendidikan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	Indeks Pengendalian Program Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.150.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,



Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha,
M.Eng

Asisten Deputi
Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan
Menengah,



Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Asril, M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi,

Ir. Asril, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi 1. RAK Peningkatan Pendidikan Vokasi 2. RAK Peningkatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	Indeks Pengendalian Program Bidang Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.150.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,



Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha,
M.Eng

Asisten Deputi
Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi,



Ir. Asril, M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thomas Ardian Siregar, S.IP, MA.
Jabatan : Asisten Deputi Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Moderasi Beragama,

Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng

Pihak Pertama:
Asisten Deputi
Moderasi Beragama,

Thomas Ardian Siregar, S.IP, MA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Asisten Deputi Moderasi Beragama
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Moderasi Beragama	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (RK) atau Kebijakan dalam penyelesaian isu strategis di bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	1
	Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Moderasi Beragama 1. RAK Pemberdayaan Umat Beragama dan Layanan Agama 2. RAK Peningkatan Kerjasama Dalam Pemeliharaan Kerukunan	2
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Moderasi Beragama	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Moderasi Beragama	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Moderasi Beragama	Indeks Pengendalian Program Bidang Moderasi Beragama	3

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
 Moderasi Beragama,



Ir. Yohanes Baptista Satya Sananugraha,
 M.Eng

Asisten Deputi
 Moderasi Beragama,



Thomas Ardian Siregar, S.IP, MA.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Pihak Pertama:
Kepala Biro Hukum, Persidangan,
Organisasi, dan Komunikasi,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Peringkat Komposit 4 (Skor 61 sd 80)
Meningkatnya Tata Kelola Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.707.635.000,-

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Kepala Biro Hukum, Persidangan,
Organisasi, dan Komunikasi,

Y.B. Satya Sananugraha

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Mai Linda, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Kepala Biro
Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Persidangan,

Dewi Mai Linda, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan persidangan Kemenko PMK	Jumlah Draft Dokumen Penyusunan Bahan Persidangan	1
	Jumlah Draft Dokumen Penyusunan Hasil Persidangan	1
	Jumlah Draft Dokumen Pengelolaan Data Hasil Persidangan	1

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro
Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

Kepala Bagian Persidangan,



Dewi Mai Linda, S.H.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Y.B. Satya Sananugraha

Pihak Pertama:
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaaan dan Kerjasama	Indeks Perencanaan	5
	Nilai SAKIP	81,51
	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	7
	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan	5
	Jumlah Dokumen Administrasi Kerjasama Luar Negeri	4
	Jumlah Dokumen Administrasi Kerjasama Antar Lembaga	2

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.200.000.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.767.000.000,-
Jumlah Anggaran	7.967.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,

Y.B. Satya Sananugraha

Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Dyah Ratnawati
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

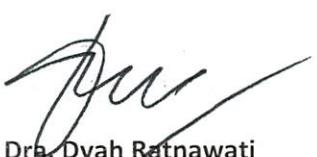
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Kepala Biro
Perencanaan dan Kerjasama,


Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis,


Dra. Dyah Ratnawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Perencanaan dan Kerjasama
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan Pengelolaan Kegiatan Strategis Kemenko PMK	Jumlah Draft Laporan Pengelolaan Kegiatan Strategis	1
	Jumlah Draft Laporan Penanganan Isu-Isu Strategis Bidang PMK	1

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro
Perencanaan dan Kerjasama,

Ir. Iwan Eka Setiawan, M.Sc

Kepala Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis,

Dra. Dyah Ratnawati



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Prasetyo, MT
Jabatan : Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pihak Pertama:
Plt. Kepala Biro Sistem Informasi dan
Pengelolaan Data,

Y.B. Satya Sananugraha

Drs. Budi Prasetyo, MT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data
Tahun Anggaran : 2022

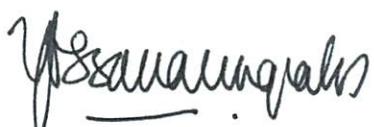
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi dan Pengelolaan Data	Indeks SPBE	3,4

Klasifikasi Rincian <i>Output</i>	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.800.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,

Plt. Kepala Biro Sistem Informasi dan
Pengelolaan Data,



Y.B. Satya Sananugraha



Drs. Budi Prasetyo, MT



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Khamim, M.Pd
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Y.B. Satya Sananugraha
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pihak Pertama:
Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,

Y.B. Satya Sananugraha

Dr. Khamim, M.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme ASN	78
	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Unit Setkemenko	100%
	Indeks IKPA	97,7

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	125.813.151.000,-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.000.000.000,-
Layanan Manajemen SDM Internal	2.958.490.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.985.133.000,-
Jumlah Anggaran	130.771.641.000,-

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan,



Y.B. Satya Sananugraha

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,



Dr. Khamim, M.Pd



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Khamim, M.Pd
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

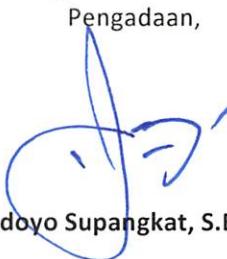
Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,



Dr. Khamim, M.Pd

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Rumah Tangga dan
Pengadaan,



Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Tangga dan Pengadaan Kemenko PMK	Jumlah Draft Dokumen Rumah Tangga	1
	Jumlah Draft Dokumen Pengadaan	1

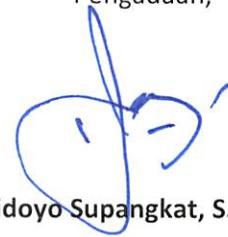
Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia,



Dr. Khamim, M.Pd

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan,



Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yusuf Asnani, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Kepala Bagian Rumah Tangga dan
Pengadaan,



Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Rumah Tangga,



M. Yusuf Asnani, S.Kom

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Tangga Kemenko PMK	Jumlah Bahan Draft Dokumen Rumah Tangga	1

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan,



Dwidoyo Supangkatan, S.E., M.A.

Kepala Subbagian Rumah Tangga,



M. Yusuf Asnani, S.Kom



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Wijayanti, S.Sos, M.A.
Jabatan : Kepala Subbagian Pengadaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.
Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan

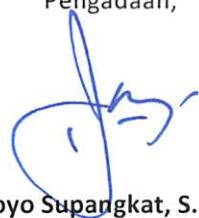
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Kepala Bagian Rumah Tangga dan
Pengadaan,



Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Pengadaan,



Putri Wijayanti, S.Sos, M.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Kemenko PMK	Jumlah Bahan Draft Dokumen Pengadaan	1

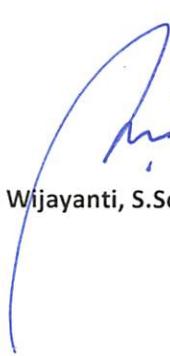
Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan,



Dwidoyo Supangkat, S.E., M.A.

Kepala Subbagian Pengadaan,



Putri Wijayanti, S.Sos, M.A.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Khamim, M.Pd
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Protokol,

Dr. Khamim, M.Pd

Heri Sukoco, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Penatausahaan Pimpinan dan Keprotokolan Kemenko PMK	Jumlah Draft Pedoman (NSPK) Bidang Penatausahaan Pimpinan dan Keprotokoleran Kemenko PMK	1

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Protokol,



Dr. Khamim, M.Pd



Heri Sukoco, S.E.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadang Iskandar, S.Sos
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Protokol,

Heri Sukoco, S.E.

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri
Koordinator,

Dadang Iskandar, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha Menteri Koordinator PMK	Jumlah Bahan Draft Pedoman (NSPK) Bidang Ketatausahaan Menteri Koordinator	1

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,



Heri Sukoco, S.E.

Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator,



Dadang Iskandar, S.Sos



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fika Handayani, S.K.M.
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Protokol,

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris
Kementerian Koordinator dan Staf Ahli,


Heri Sukoco, S.E.


Fika Handayani, S.K.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator PMK	Jumlah Bahan Draft Pedoman (NSPK) Bidang Ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator PMK	1

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,

Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli,

Heri Sukoco, S.E.

Fika Handayani, S.K.M.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Nusantari, S.I.Kom, M.A.
Jabatan : Kepala Subbagian Protokol

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heri Sukoco, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Protokol,

Heri Sukoco, S.E.

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Protokol,

Adinda Nusantari, S.I.Kom, M.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Layanan Protokol Kemenko PMK	Jumlah Bahan Draft Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokoleran	1

Jakarta, Januari 2022

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol,



Heri Sukoco, S.E.

Kepala Subbagian Protokol,



Adinda Nusantari, S.I.Kom, M.A.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhamad Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua:
Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhamad Effendy

Pihak Pertama:
Inspektur,
Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan internal	Indeks Manajemen Risiko	Level 3
	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	8

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	77.720.000,-
Layanan Manajemen Internal	822.280.000,-
Jumlah Anggaran	900.000.000,-

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhamad Effendy

Inspektur,



Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anies Kristianita Dwihening, SE
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M
Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2022

Pihak Kedua:
Inspektur,

Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat,

Anies Kristianita Dwihening, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Inspektorat
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Draft Dokumen Pengawasan Internal	8

Jakarta, Februari 2022

Inspektur,



Gunarso Djoko Santoso, Ak, M.M

Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat,



Anies Kristianita Dwihering, SE



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Radius Siregar
Jabatan : Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andie Megantara
Jabatan : Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2022

Pihak Kedua:
Ketua
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Andie Megantara

Pihak Pertama:
Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas dukungan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial Nasional	Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional	7
Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran Satker Sekretariat DJSN	Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan, Program, Anggaran dan Pelaporan	5
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan	1
	Jumlah Dokumen Publikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	1
	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Alat komunikasi	7
	Jumlah Pengadaan Fasilitas Perkantoran	3
	Jumlah Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Satker	1
	Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran	1

Klasifikasi Rincian Output	Anggaran (Rp.)
Kebijakan Bidang Sosial	6.500.000.000,-
Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.882.862.000,-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	103.050.000,-
Jumlah Anggaran	13.485.912.000,-

Jakarta,

2022

Ketua
 Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Andie Megantara

Sekretaris
 Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar

**RENCANA AKSI SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2022**

NO.	I. PEJABAT PENILAI		NO.	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	Andie Megantara, Ph.D.	1	Nama	Ricky Radius Siregar, S.Sos, MAP		
2	NIP	19700129 199603 1 001	2	NIP	19740428 200212 1 008		
3	Pangkat/Gol.	Pembina Utama Madya (IV/d)	3	Pangkat/Gol.	Pembina Utama Muda (IV/c)		
4	Jabatan	Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional	4	Jabatan	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional		
5	Unit Kerja	Dewan Jaminan Sosial Nasional	5	Unit Kerja	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional		
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		TARGET TRIWULAN				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Menetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional Tahun 2022 <i>1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional Tahun 2022</i>		<i>2 Dokumen</i>				
2.	Menyusun Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) <i>1. Rumusan Kebijakan/Draf Peraturan Penyelenggaraan SJSN</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	
3.	Menyusun Dokumen Perencanaan, Program, Anggaran dan Pelaporan <i>1. Jumlah Laporan Perencanaan Program Anggaran dan Pelaporan</i>		<i>2 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	
4.	Menyusun Dokumen Evaluasi Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan <i>1. Jumlah Dokumen Evaluasi Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan</i>						<i>1 Dokumen</i>
5.	Menyusun Dokumen Publikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional <i>1. Jumlah Dokumen Publikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional</i>						<i>1 Dokumen</i>
6.	Melaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan alat komunikasi <i>1. Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan alat komunikasi</i>			<i>2 Unit</i>	<i>5 Unit</i>		
7.	Melaksanakan pengadaan fasilitas perkantoran <i>1. Jumlah Pengadaan Fasilitas Perkantoran</i>				<i>3 Unit</i>		

8.	Menyusun Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Satker 1. <i>Jumlah Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>				1 Dokumen
9.	Menyusun Dokumen Layanan Perkantoran 1. <i>Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran</i>				1 Dokumen

Jakarta,

2022

Ketua
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Andie Megantara

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ricky Radius Siregar

Jabatan : Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2022

Pihak Kedua:
Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Umum Sekretariat
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Fiki Ikrom Ibrahim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran Satker Sekretariat DJSN	Jumlah Draf Dokumen Administrasi Perencanaan, Program, Anggaran dan Pelaporan	5
	Jumlah Draf Dokumen Evaluasi Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan	1
	Jumlah Draf Dokumen Publikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	1
	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Alat komunikasi	7
	Jumlah Pengadaan Fasilitas Perkantoran	3
	Jumlah Draf Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Satker	1
	Jumlah Draf Dokumen Layanan Perkantoran	1

Jakarta,

2022

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,



Ricky Radius Siregar

Kepala Bagian Umum Sekretariat
Dewan Jaminan Sosial Nasional,



Fiki Ikrom Ibrahim

**RENCANA AKSI SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2022**

NO.	I. PEJABAT PENILAI		NO.	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Ricky Radius Siregar, S.Sos, MAP	1	Nama	Fiki Ikrom Ibrahim, S.E, M.Ak	
2	NIP	19740428 200212 1 008	2	NIP	19830929 200901 1 002	
3	Pangkat/Gol.	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	Pangkat/Gol.	Penata Tingkat I (III/d)	
4	Jabatan	Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional	4	Jabatan	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	
5	Unit Kerja	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	5	Unit Kerja	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		TARGET TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Menetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional Tahun 2022 1. <i>Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional Tahun 2022</i>		2 Dokumen			
2.	Menyusun Dokumen Perencanaan, Program, Anggaran dan Pelaporan 1. <i>Jumlah Draf Laporan Perencanaan Program Anggaran dan Pelaporan</i>		2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Menyusun Dokumen Evaluasi Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan 1. <i>Jumlah Draf Dokumen Evaluasi Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan</i>					1 Dokumen
4.	Menyusun Dokumen Publikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional 1. <i>Jumlah Draf Dokumen Publikasi Sistem Jaminan Sosial Nasional</i>					1 Dokumen
5.	Melaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan alat komunikasi 1. <i>Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan alat komunikasi</i>			2 Unit	5 Unit	
6.	Melaksanakan pengadaan fasilitas perkantoran 1. <i>Jumlah Pengadaan Fasilitas Perkantoran</i>				3 Unit	
7.	Menyusun Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Satker 1. <i>Jumlah Draf Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>					1 Dokumen
8.	Menyusun Dokumen Layanan Perkantoran 1. <i>Jumlah Draf Dokumen Layanan Perkantoran</i>					1 Dokumen

Jakarta,

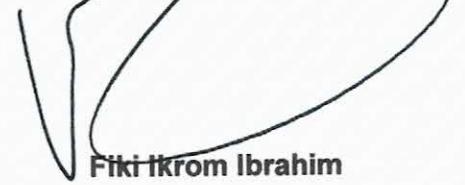
2022

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,



Ricky Radius Siregar

Kepala Bagian Umum Sekretariat
Dewan Jaminan Sosial Nasional,



Fiki Ikrom Ibrahim



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reny Putri Septiawati

Jabatan : Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2022

Pihak Kedua:

Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan
Jaminan Sosial Nasional,

Fiki Ikrom Ibrahim

Pihak Pertama:

Kepala Subbagian Protokol Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial
Nasional,

Reny Putri Septiawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran Satker Sekretariat DJSN	Jumlah Bahan Draf Dokumen Evaluasi Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan	1

~~Kepala Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan
Sosial Nasional,
Fiki Ikrom Ibrahim~~

Jakarta, 2022

Kepala Subbagian Protokol Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional,


Reny Putri Septiawati

**RENCANA AKSI SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2022**

NO.	I. PEJABAT PENILAI		NO.	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Fiki Ikrom Ibrahim, S.E, M.Ak	1	Nama	Reny Putri Septiawati, S.Hum, M.A
2	NIP	19830929 200901 1 002	2	NIP	19880914 201403 2 001
3	Pangkat/Gol.	Penata Tingkat I (III/d)	3	Pangkat/Gol.	Penata (III/c)
4	Jabatan	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	4	Jabatan	Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
5	Unit Kerja	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	5	Unit Kerja	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		TARGET TRIWULAN		
			TW I	TW II	TW III
1.	Menyusun Dokumen Evaluasi Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan <i>Jumlah Bahan Draf Dokumen Evaluasi Pedoman (NSPK) Bidang Keprotokolan</i>				
					<i>1 Dokumen</i>

Jakarta,

2022

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan
Sosial Nasional,

Fiki Ikrom Ibrahim

Kepala Subbagian Protokol Bagian
Umum Sekretariat Dewan Jaminan
Sosial Nasional,

Reny Putri Septiawati



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Nendang

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fiki Ikrom Ibrahim

Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2022

Pihak Kedua:
Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan
Jaminan Sosial Nasional,

Fiki Ikrom Ibrahim

Pihak Pertama:
Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga Bagian Umum Sekretariat Dewan
Jaminan Sosial Nasional,

Agus Nendang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas tatakelola anggaran Satker Sekretariat DJSN	Jumlah Bahan Draf Dokumen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Alat komunikasi	7
	Jumlah Bahan Draf Dokumen Pengadaan Fasilitas Perkantoran	3
	Jumlah Bahan Draf Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Satker	1
	Jumlah Bahan Draf Dokumen Layanan Perkantoran	1

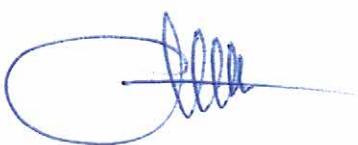
Jakarta,

2022

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan
Sosial Nasional,


Fiki Ikrom Ibrahim

Kepala Subbagian Tata Usaha dan
Rumah Tangga Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial
Nasional,


Agus Nendang

**RENCANA AKSI SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2022**

NO.	I. PEJABAT PENILAI		NO.	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI		
1	Nama	Fiki Ikrom Ibrahim, S.E, M.Ak	1	Nama	Agus Nendang, S.T	
2	NIP	19830929 200901 1 002	2	NIP	19800815 201012 1 001	
3	Pangkat/Gol.	Penata Tingkat I (III/d)	3	Pangkat/Gol.	Penata (III/c)	
4	Jabatan	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	4	Jabatan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	
5	Unit Kerja	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	5	Unit Kerja	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	
NO.	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		TARGET TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Melaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan alat komunikasi <i>1. Jumlah Bahan Draf Dokumen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Alat Komunikasi</i>			2 Unit	5 Unit	
2.	Melaksanakan pengadaan fasilitas perkantoran <i>1. Jumlah Bahan Draf Dokumen Pengadaan Fasilitas Perkantoran</i>				3 Unit	
3.	Menyusun Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Satker <i>1. Jumlah Bahan Draf Dokumen Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>					1 Dokumen
4.	Menyusun Dokumen Layanan Perkantoran <i>1. Jumlah Bahan Draf Dokumen Layanan Perkantoran</i>					1 Dokumen

Jakarta, 2022

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan
Sosial Nasional,


Fiki Ikrom Ibrahim

Kepala Subbagian Tata Usaha dan
Rumah Tangga Bagian Umum
Sekretariat Dewan Jaminan Sosial
Nasional,


Agus Nendang



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fery Ferdiansyah

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ricky Radius Siregar

Jabatan : Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2022

Pihak Kedua:
Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Ricky Radius Siregar

Pihak Pertama:
Kepala Bagian Persidangan Sekretariat
Dewan Jaminan Sosial Nasional,

Fery Ferdiansyah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Unit Satuan Kerja : Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas dukungan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Jaminan Sosial Nasional	Jumlah Draf Dokumen Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional	7

Jakarta, 2022

Sekretaris
Dewan Jaminan Sosial Nasional,



Ricky Radius Siregar

Kepala Bagian Persidangan
Sekretariat
Dewan Jaminan Sosial Nasional,



Fery Ferdiansyah